

SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERDAHAP
KINERJA APARAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**ENDANG PERMATA SARI
NIM 105730 3745 12**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2016**

SKRIPSI

**PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERDAHAP
KINERJA APARAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**ENDANG PERMATA SARI
NIM 105730 3745 12**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2016

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan Judul : **PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN dan ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nama : **ENDANG PERMATA SARI**

Stambuk : **10573 03745 12**

Program Studi : **AKUNTANSI**

Fakultas : **EKONOMI DAN BISNIS**

Perguruan Tinggi : **UNIVERSITAS MUHAMMADYAH MAKASSAR**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan disajikan di depan panitia penguji skripsi strata 1(S1) pada hari Senin 04 November 2016 pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, November 2016

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPAI. Samsul Rizal, S.E., M.M.

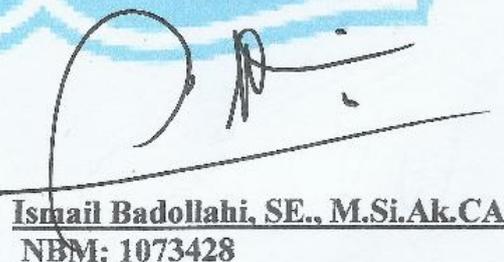
Diketahui:

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Prodi Akuntansi



Dr. H. Mahroq Nuhung, M.A
KTAM: 797.094



Ismail Badollahi, SE., M.Si.Ak.CA
NBM: 1073428

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas nama ENDANG PERMATA SARI No Stambuk : 10573 03745 12 telah diperiksa dan diterima oleh panitia ujian skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar nomor : tahun 1438 H/2016 dan telah dipertahankan didepan penguji pada hari Sabtu tanggal 04-11-2016, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, November 2016

Panitia Ujian :

1. Pengawas Umum : **Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM** (*Abd. Rahman*)

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : **Dr. H. Nuhung Mahmud, MA** (*Nuhung Mahmud*)

(Dekan Fakultas Ekonomi)

3. Sekretaris : **Drs. H. Sultan Sarda, MM** (*Sultan Sarda*)

(WD I Fakultas Ekonomi)

4. Penguji :

a. **Dr. Andi Rustam, SE.,MM.,AK.CA.CPAI** (*Andi Rustam*)

b. **Saida Said, SE.,M.,AK** (*Saida Said*)

c. **Dr. Agussalim HR., SE., MM** (*Agussalim HR.*)

d. **Hj Lily Ibrahim, SE., M., Si** (*Hj Lily Ibrahim*)

Nama Mahasiswa : Endang Permata Sari
Nomor Stambuk : 105730374512
Program Studi : Strata Satu (S1)
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Luwu Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya saya sendiri dan bukan hasil ciptaan orang lain ataupun di buatkan oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, November 2016

Yang menyatakan

Endang Permata Sari

ABSTRAK

ENDANG PERMATA SARI, 2016. **Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur. Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.** Di Bimbing Oleh **H. Andi Rustam** selaku pembimbing I dan **Samsul Rizal** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Berdasarkan metode analisis yang sudah dilakukan dapat disimpulkan Hasil uji hipotesis diperoleh nilai t hitung sebesar 1,674 dengan taraf signifikansi -0,180 atau lebih besar dari 0,05 ($<0,05$) sehingga hipotesis dinyatakan ditolak, atau dengan kata lain partisipasi anggaran tidak berpengaruh negatif terhadap kinerja. Seorang manajer dengan tingkat partisipasi dalam penyusunan anggaran yang tinggi tidak dapat meningkatkan kinerja yang dimiliki

Kata Kunci: Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA APARAT DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR” ini dapat diselesaikan. Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada

1. Bapak Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Mahmud Nuhung, M.A. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Bapak Dr. H. Andi Rustam, S.E., M.M., Ak., CA., CPAI. selaku pembimbing I dan Samsul Rizal, S.E., M.M selaku pembimbing II dengan segala kerendahan hati telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan banyak ilmu dan berbagai pengalaman selama penulis menuntut ilmu.
6. Kepada Kepala Kantor dan seluruh Pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang telah bersedia menerima dan memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini.
7. Terima Kasih Kepada Ibunda Djumiem dan Ayahanda Soemani (alm) yang Tercinta yang telah membesarkan dan memberikan kasih sayang yang tak ternilai harganya serta memberikan doa yang tak henti-hentinya, sampai detik ini.
8. Terima kasih kepada Ricky Ryandux Loa yang selama ini sangat membantu dalam menyusun skripsi.
9. Saudara-saudaraku Adi Sapotra, Sri indah Lestari, Nurnaningsih, Bambang Suprianto, Bambang Prihatin, Edi Sasmito, dan Asih Kusumawati. yang selalu mendorong dan memotivasi segala urusan penulis hingga saat ini.
10. Kepada sahabat-sahabat saya serta seluruh teman-teman jurusan Akuntansi, khususnya kelas Akuntansi 5 terima kasih semuanya, suka duka dan canda tawa yang kita alami akan menjadi kenangan yang tak terlupakan.

Makassar, November 2016

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pengertian Anggaran	8
B..Anggaran sektor publik	10
C..Partisipasi anggaran sektor publik	14
D. Kinerja aparat pemerintah	24
E..Indikator pengukuran kerja.....	28

F.. Peneliti terdahulu	31
G. Kerangka Pikir.....	32
H. Hipotesis	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Tempat dan Waktu Penelitian	34
B..Jenis Data	35
C..Metode pengumpulan data.....	35
D. Metode analisis Data	36
E..Populasi dan sampel	37
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	39
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kabupaten Luwu Timur.....	39
B..Visi dan Misi.....	44
C.. Struktur Organisasi.....	46
D. Uraian Tugas Dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.....	48
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
A. Karakteristik Responden.....	52
B..Analisis Regresi Hasil Penelitian.....	56
C..Pembahasan Hasil Penelitian.....	60
BAB VI PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B..Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Jadwal waktu penelitian.....	34
TABEL 2	: Tingkat Distribusi kuisisioner.....	52
TABEL 3	: Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.....	54
	: Karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan.....	54
	: Karakteristik responden berdasarkan lama bekerja.....	55
TABEL 4	: Hasil uji normalitas persamaan regresi 1.....	57
TABEL 5	: Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	57
TABEL 6	: Hasil pengujian hipotesis	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Kerangka Fikir.....	33
Gambar 2 : Struktur Organisasi.....	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 :Surat Permohonan izin penelitian
- Lampiran 2 :Surat Persetujuan Penelitian
- Lampiran 3 :Skor hasil uji coba kuisisioner mengenai pertisipasi anggaran
- Lampiran 4 :Skor hasil uji coba kuisisioner mengenai kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Indonesia menganut asas yang memberi kebebasan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintah melalui Otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan. Pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, pemerintah daerah diuntut untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan asas-asas pelayanan publik yang didalamnya meliputi :transparansi , akuntabilitas, partisipasif, kesamaan hak, keseimbangan hak, dan kewajiban.

Setiap organisasi termasuk pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan tugasnya wajib mempunyai perencanaan yang disusun dan akan dijadikan pedoman pada saat melaksanakan tugas. Oleh karena itu pemerintah merumuskan berbagai kebijakan yang diatur dalam bentuk anggaran akan dapat dilihat seberapa besar fungsi pemerintah dalam melaksanakan berbagai urusan pemerintah yang menjadi tanggung jawabnya dan factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhinya.

Sebagai salah satu implementasi dari akuntabilitas kinerja pemerintah, maka dilaksanakan kewajiban pertanggungjawaban yang dimulai dari proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan atas tugas dan fungsi pemerintah dalam

mewujudkan visi dan misi serta tujuan yang ditetapkan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk penetapan anggaran. Dalam penyusunan anggaran, awalnya kepala daerah dibantu dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) menyusun rancangan kebijakan umum APBD (KUA). Rancangan KUA memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan, disertai dengan asumsi yang mendasarinya. Hasil rancangan KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD.

Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja. Adapun kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Mariana2005). Proses penganggaran menggunakan pendekatan kinerja diatur dalam permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas permendagri nomor 13 nomor 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan tentang pedoman dalam pembentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah (RAPBD), pembentukan RAPBD dilaksanakan oleh tim anggaran pemerintahdaerah (TAPD) bersama-sama unit organisasi perangkat Daerah (unit kerja). Rancangan anggaran unit kerja tercantum pada

suatu dokumen tentang pedoman evaluasi Daerah otonomi hasil pemekaran setelah berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahdaerah.

Keberhasilan proses anggaran salah satunya dapat dipengaruhi oleh sikap /prilaku pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Salah satu literatur yang relevan dalam bidang akuntansi untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah akuntansi keprilakuan. Pada akuntansi keprilakuan terdapat pembahasan mengenai hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial (setiawan,2009).

Partisipasi dapat meningkatkan manajemen. Partisipasi juga dapat meningkatkan kerja sama antara anggota kelompok dalam penetapan tujuan, hal ini dikemukakan oleh Setiawan (2009).

Partisipasi penyusunan anggaran merupakan keterlibatan seluruh manajer (baik kasubag sampai kabag) dalam suatu instansi untuk melakukan kegiatan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam anggaran. Dengan adanya keterlibatan tersebut akan mendorong para kabag/kasub untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembannya sehingga para kabag akan meningkatkan kinerjanya agar mereka dapat mencapai sasaran / target yang telah ditetapkan dalam anggaran. Menurut Indra (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai dalam periode tertentu.

Beberapa jenis informasi yang digunakan dalam pengendalian disiapkan dalam rangka menjamin bahwa pekerjaan yang dilakukan telah dilakukan secara

efektif dan efisien. Dengan demikian mengukur kinerja tidak hanya informasi finansial tetapi juga informasi nonfinansial.

Kinerja pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Gusmal, 2007).

Nama program, tujuan dan sasaran program output yang dihasilkan, sumber daya yang dibutuhkan, periode pelaksanaan program, alokasi dan indikator kerja. Seluruh program yang telah dirancang oleh masing-masing unit kerja, selanjutnya diserahkan kepada panitia eksekutif. Panitia eksekutif selanjutnya menganalisis dan bila perlu menyeleksi program-program yang akan dijadikan rencana kerja di masing-masing unit kerja berdasarkan program kerja yang masuk ke panitia eksekutif, selanjutnya disusun dan dirancang draf kebijakan pembangunan dan kebijakan anggaran tahunan (APBD) yang nantinya akan dibahas pihak legislatif (Permendagri No 13 Tahun 2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari (2011) menunjukkan bahwa untuk mencapai kinerja yang optimal tentunya sangat dipengaruhi oleh komitmen yang dimiliki oleh karyawan dan pertanggung jawaban aparat Pemerintah dalam menjalankan tugas dan melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan, diperlukan kualitas kinerja aparatur yang bermutu.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bambang dan Osmad (2007) dalam Sardjito (2007), yang menunjukan antara partisipasi

penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah semarang. terhadap kinerja yang ditetapkan pada pemerintah daerah dan untuk melihat seberapa besar pengaruh penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah kabupaten Semarang.

Dalam Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bahwa salah satu kelemahan dari pemerintahan ini adalah Sistem Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Luwu Timur belum mengenal *stakeholdernya* secara baik sehingga kebijakan dan pendekatan dalam kinerja yang dilaksanakan belum mengenai sasaran. Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja aparat pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur cukup rendah. Jika kebijakan dan pendekatan dan dilaksanakan belum mengenai sasaran maka anggaran yang hendak dicapai tidak akan disusun dengan baik, yang diakibatkan dari kurangnya komunikasi antara kariawan atau pegawai di setiap unit (SKPD) dengan *stakeholdernya*.

Berdasarkan penjelasan diatas maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

“Apakah partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap Kinerja Aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Daerah

- a) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah kabupaten Luwu Timur mengambil kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyusunan anggaran yang dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah didalam instansi-instansi yang berada dilingkungan pemerintah kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah didalam membuat kebijakan dan serta menentukan arah dan strategi didalam perbaikan kinerja pemerintah daerah kabupaten Luwu Timur dimasa yang akan datang.
- c) Sebagai informasi sebagai tambahan referensi dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah setelah diberlakukanya anggaran berbasis kinerja.

2. Bagi akademis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya penelitian mengenai pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang akuntansi pemerintahan khususnya mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- c) Sebagai dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya dan memberi masukan pada pengembangan akuntansi sektor publik.

3. Bagi Peneliti

- a) Peneliti ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperluas pengetahuan serta wawasan mengenai partisipasi penyusunan anggaran dan pengaruhnya terhadap kinerja Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Hasil penelitian ini dapat mengetahui sejauhmana pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Anggaran

Salah satu alat yang digunakan manajemen dalam melakukan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Mardiasmo (2002:61) menyatakan bahwa “Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran”.

Penganggaran merupakan komitmen resmi manajemen yang terkait dengan harapan manajemen tentang pendapatan biaya dan beragam transaksi keuangan dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Suatu rencana yang telah disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tentu dimasa yang akan datang. Oleh karena rencana yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Maka anggaran juga biasa disebut dengan rencana keuangan. Dalam anggaran satuan kegiatan dan satuan uang menempati posisi penting, dalam arti segala kegiatan akan di kuantifikasikan dalam satuan uang sehingga dapat diukur mencapai efisiensi dan efektivitas dari kegiatan yang dilakukan.

Menurut Ahmad (2014 :184) Karakteristik suatu anggaran antara lain :

- a) Dinyatakan dalam satuan keuangan (moneter), walaupun angkanya berasal dari angka yang bukan satuan keuangan (misalnya unit terjual dan jumlah produksi)
- b) Mencakup kurun satu tahun atau dalam periode tertentu lainnya.
- c) Isinya menyangkut komitmen manajemen, yaitu manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang telah dianggarkan.
- d) Usulan anggaran dinilai dan disetujui oleh orang yang mempunyai wewenang lebih tinggi daripada yang menyusunnya.
- e) Jika anggaran sudah disahkan, maka anggaran tersebut tidak dapat diubah kecuali dalam hal khusus.
- f) Hasil aktual akan dibandingkan dengan anggaran secara periodik dan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dianalisis dan dijelaskan.

Anggaran memiliki fungsi yang sama dengan tujuan organisasi yaitu sebagai perencanaan, pengkoordinasian dan sebagai fungsi pengendalian. Untuk itu anggaran dapat mengontrol aktivitas unit kerja organisasi sesuai dengan apa yang dianggarkan.

Menurut Sardjito (2007), anggaran memiliki dua peran. Pertama, anggaran fungsi sebagai perencanaan, yang didalamnya berisi tentang ringkasan rencana-rencana keuangan organisasi dimasa yang akan datang. Kedua, anggaran juga sekaligus berfungsi untuk mengukur kinerja manajerial.

Hal ini selaras dengan yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2002) mengemukakan bahwa terdapat beberapa aspek pada anggaran yang meliputi perencanaan, koordinasi, implementasi, pengendalian, evaluasi tentang apa yang sudah dilakukan, dan sebuah dasar pencapaian tujuan dengan memberikan penghargaan.

Tujuan anggaran menurut Nafarin (2013:19) antara lain adalah :

- a. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber daya investasi dana.
- b. Memberikan batasan atas sejumlah dana yang dicari dan digunakan.
- c. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana, sehingga dapat memudahkan pengawasan.
- d. Merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
- e. Menampung menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

B. Anggaran Sektor Publik

Bentuk organisasi dalam kehidupan sehari-hari terdapat dua jenis, yaitu organisasi sektor publik/Pemerintah dan sektor privat (swasta). Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang bertujuan menyediakan/memproduksi barang-barang publik demi kesejahteraan dari masyarakat yang menjadi konsumennya. Barang publik adalah barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat

barang/jasa tersebut dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama (kawedar, rohman, Handayani, 2008).

Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik .

Anggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang menggunakan dana milik rakyat (Mardiasmo, 2009). Anggaran digunakan untuk mengendalikan biaya dan menentukan bidang-bidang masalah dalam organisasi tersebut dengan membandingkan hasil kinerja yang telah di anggarkan secara periodik. Agar anggaran itu tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan maka diperlukan kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan, pegawai dan pimpinan dalam penyusunan anggaran, karena proses penyusunan anggaran merupakan kegiatan yang penting dan kompleks, adanya kemungkinan akan menimbulkan dampak fungsional terhadap sikap dan perilaku anggota organisasi (Dedi, 2008).

Anggaran dibuat oleh kepala Daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada kepala Daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku. Proses anggaran Daerah disusun berdasarkan

pendekatan kinerja dalam Permendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat Daerah (unit kerja).

Dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di Daerah, telah dilakukan reformasi penganggaran dengan menerapkan tiga (3) pendekatan yaitu:

- a. Penganggaran dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah atau dikenal dengan Medium Term Expenditure Framework. Pendekatan ini menurut kita menyusun rencana anggaran untuk dua tahun anggaran berturut-turut, yaitu tahun anggaran bersangkutan, dan rencana anggaran untuk tahun berikutnya.
- b. Penganggaran Terpadu. Pendekatan ini menyatukan penyusunan anggaran baik untuk yang sifatnya mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran rutin) maupun anggaran yang tidak mengikat (dulu dikenal dengan istilah anggaran pembangunan) yang sebelumnya dilakukan secara terpisah. Pendekatan ini memaksa instansi Pemerintah untuk memandang perencanaan dan penganggaran secara utuh agar dapat menjalankan fungsinya secara baik dan benar.
- c. Penganggaran Berbasis Kinerja. Pendekatan ini mengatakan bahwa besarnya alokasi anggaran didasarkan atas target prestasi kinerja yang diusulkan oleh instansi pengusul. Ukuran kinerja untuk program adalah manfaat sedangkan untuk kegiatan adalah keluaran. Penganggaran kinerja atau berdasarkan prestasi kerja adalah penganggaran yang menekankan

pada orientasi keluaran dan hasil yang memiliki konsisten pada mekanisme penyusunan anggaran.

Pembuatan anggaran dalam organisasi sektor publik, terutama pemerintah merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan. Berbeda dengan penyusunan anggaran diperusahaan swasta yang muatan politisnya relatif lebih kecil.

Menurut Mardiasmo (2002), terdapat empat siklus anggaran dalam sector Pemerintah yang meliputi :

1. Tahapan persiapan anggaran

Pada tahapan ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang telah tersedia. Terkait dengan adanya penafsiran tersebut maka perlu diperhatikan sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, yaitu dengan cara melakukan penafsiran pendapatan secara lebih akurat. Selain adanya penafsiran perlu disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap Ratifikasi

Tahap ratifikasi adalah tahap pengesahan rencana anggaran yang dilakukan badan eksekutif dengan badan legislatif agar menjadi anggaran final. Tahap ratifikasi ini melibatkan proses politik yang cukup rumit dan berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, namun juga harus mempunyai political skill, dan coalition building yang memadai. Dalam hal ini integritas dan kesiapan mental (coalition

building) sangat penting, karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pernyataan dan bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Tahap ini merupakan yang sangat penting dan harus diperhatikan oleh manajer keuangan Pemerintah. Dalam hal ini manajer keuangan public mempunyai system (informasi) akuntansi dan system pengendalian manajemen. Manajer keuangan public bertanggung jawab untuk menciptakan system akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati sebelumnya.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika pada tahap implementasi telah didukung dengan system akuntansi dan system pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pelaporan dan evaluasi anggaran tidak akan menemukan banyak masalah.

Mardiasmo (2002:63) mengungkapkan ada beberapa fungsi utama dari adanya anggaran sektor publik yaitu :

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planining Tool)
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Political Tool)

- d. Anggaran sebagai alat kordinasi dan komunikasi (Coordination & Comunication)
- e. Anggaran sebagi alat penilaian kinerja (Performance Measurment Tool)
- f. Anggaran sebagai alat motifasi (Motivation Tool)
- g. Anggaran sebagai alat menciptakan ruang publik

C. Partisipasi Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan pernyataan mengenai setimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Dalam organisasi sektor publik penganggaran merupakan suatu proses politik. Hal tersebut berbeda dengan sektor swasta yang relatif lebih kecil nuansa politiknya. Pada sektor swasta anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup bagi publik, namun pada sektor publik anggran merupakan hal yang harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan dan diberi masukan. Anggaran pada sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas dan pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik.

Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan staretgi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan

perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik :

- Aspek perencanaan
- Aspek pengendalian
- Aspek akuntabilitas

1. Pentingnya Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan dsbnya agar terjamin secara layak. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang dibuat pemerintah melalui anggran yang dibuat.

Dalam sebuah negara demokrasi, pemerintah mewakili kepentingan rakyat, uang yang dimiliki oleh pemerintah adalah uang rakyat dan anggaran menunjukkan rencana pemerintah untuk membelanjakan uang rakyat. Anggaran merupakan blue print keberadaan sebuah negra dan merupakan arahan di masa yang akan datang.

2. Anggaran dan Kebijakan Fiskal Pemerintah

Kebijakan fiskal adalah usaha yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi keadaan ekoomi melalui sistem pengeluaran atau sistem perpajakan untuk mencapai tujuan tertentu. Alat utama kebijakan fiskal adalah anggaran. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan dan kualitas hidup masyarakat. Anggaran sektor publik harsu dapat memenuhi kriteria sbb :

- Merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat
- Menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-depatemen pemerintah, baik propinsi maupun daerah.

Aliran uang yang terkait dengan aktivitas pemerintahan akan mempengaruhi harga, lapangan kerja, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan beban pajak yang harus dibayar atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Keputusan anggaran yang dibuat pemerintah daerah dan propinsi seharusnya dapat merefleksikan prioritas pemerintah daerah dan propinsi dengan baik.

Anggaran sektor publik penting karena :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2. Anggaran dibuat karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat yang terus berkembang, sedangkan sumber daya jumlahnya terbatas.
3. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyat. Dalam hal ini anggaran publik merupakan instrumen pelaksanaan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga publik yang ada.

Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu

1. Sebagai alat perencanaan
2. Alat pengendalian
3. Alat kebijakan fiskal
4. Alat politik

5. Alat koordinasi dan komunikasi
6. Alat penilaian kinerja
7. Alat motivasi
8. Alat menciptakan ruang publik.

3. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan (Planning tool)

Anggaran merupakan alat pengendalian manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

- Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi dan sasaran yang telah ditetapkan
- Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya
- Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun
- Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi

4. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian (Control tool)

Sebagai alat pengendalian anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggaran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati dan manajer publik lainnya dapat

dikendalikan lewat anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.

Sebagai alat penengendali manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa pemerintah masih mempunyai cukup uang untuk memenuhi kewajibannya, selain itu juga digunakan sebagai pemberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien tanpa ada korupsi dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara :

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan
2. Menghitung selisih anggaran
3. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan
4. Merivisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.
5. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan unrtuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

6. Anggaran Sebagai Alat Politik (Political tool)

Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif

atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran bukan sekedar masalah teknis tetapi lebih merupakan alat politik, karenanya pembuatan anggaran publik membutuhkan political skill, coalition holding, keahlian negosiasi, pemahaman tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui akan menjatuhkan kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintah.

7. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and Communication tool)

Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Disamping itu anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

8. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja (Performance measurement tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holer (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

9. Anggaran Sebagai Alat Motivasi (Motivation tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

10. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (*Public Sphere*)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/MPR. Masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam penganggaran publik. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran publik untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang kurang terorganisasi akan menyampaikan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Pengangguran dan tuna wisma dan kelompok lain yang kurang terorganisasi akan mudah dan tidak berdaya mengikuti tindakan pemerintah. Jika tidak ada alat untuk menyampaikan suara mereka, mereka akan mengambil tindakan dengan jalan lain seperti dengan tindakan massa, melakukan boikot dsbnya

Jenis-Jenis Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibagi menjadi menjadi 2 yaitu :

1. Anggaran operasional
2. Anggaran Modal

1. Anggaran Operasional

Anggaran digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin yaitu belanja yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran saja dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin karena pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun.

Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain belanja administrasi umum dan belanja operasional dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dsbnya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal adalah pengeluaran yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan pemerintah dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

Pada dasarnya pemerintah tidak memiliki uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik publik. Dalam sebuah masyarakat yang demokratis rakyat memberi mandat kepada pemerintah melalui pemilihan umum. Politisi mentranslasikan mandat melalui tersebut melalui kebijakan dan program yang memberi mamfaat lebih kepada pemilih yang direfleksikan dalam anggaran. Pemerintah tidak mungkin memebuhi semua permintaan stake holdernya secara simultan, tetapi pemerintah akan memilih program yang menjadi prioritas.

Disinilah fungsi anggaran yang akan digunakan sebagai alat politik dalam memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan pada sektor tersebut.

Partisipasi Adalah suatu perilaku, pekerjaan, dan aktifitas yang dilakukan oleh aparat Pemerintah selama aktivitas penyusunan anggaran berlangsung, Partisipasi penyusunan anggaran dilakukan dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan nantinya bias sesuai dengan keadaan yang terjadi. Partisipasi penyusunan anggaran merupakan ciri dari penyusunan anggaran yang menekankan kepada partisipasi aparat Pemerintah Daerah untuk mempertanggung jawabkan proses penyusunan anggaran.

Mulyadi (2001) dalam Nanda (2010) menyatakan Partisipasi adalah suatu proses pengambilan keputusan bersama oleh dua atau lebih yang mempunyai dampak masa depan bagi pihak yang membuat keputusan tersebut. Partisipasi pimpinan dalam proses penyusunan anggaran merupakan proses dimana pimpinan dinilai kinerjanya, serta keterlibatan pimpinan dalam mengkondisikan anggotanya.

Dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan kerjasama untuk menentukan satu rencana. Partisipasi anggaran sektor publik menunjukkan pada luasnya partisipasi bagi aparat pemerintah daerah dalam memahami anggaran yang diusulkan oleh unit kerjanya dan pengaruh pusat pertanggungjawaban anggaran mereka. Partisipasi anggaran pada sektor publik terjadi ketika antara pihak eksekutif, legislatif, dan masyarakat bekerja sama dalam pembuatan anggaran. Anggaran dibuat oleh kepala daerah melalui usulan dari unit-unit kerja yang disampaikan kepada kepala bagian dan diusulkan kepada

kepala daerah, dan setelah itu bersama-sama DPRD menetapkan anggaran yang dibuat sesuai dengan Peraturan daerah yang berlaku. Proses anggaran daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dalam Permendagri memuat Pedoman Penyusunan Rancangan APBD yang dilaksanakan oleh tim anggaran eksekutif bersama-sama unit organisasi perangkat daerah (unit kerja).

Dengan adanya partisipasi anggaran diharapkan kinerja para aparatur pemerintah dapat meningkat. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketika suatu tujuan atau standar yang dirancang secara partisipatif disetujui, maka para pimpinan organisasi pemerintahan akan bersungguh-sungguh dalam tujuan atau standar yang ditetapkan dan memiliki rasa tanggung jawab pribadi untuk mencapainya karena ikut serta terlibat dalam penyusunannya (Darlis 2002). Pada sektor publik, partisipasi anggaran dilakukan ketika antara pihak eksekutif, legislative, dan masyarakat bekerja sama dalam pembentukan anggaran.

Unit SKPD (masing-masing instansi/dinas/kantor) membuat usulan-usulan yang kemudian diusulkan kepada Kepala Daerah, kemudian Kepala Daerah bersama DPRD membahas anggaran tersebut, hasil dari pembahasan tersebut ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai anggaran yang tentunya dibuat sesuai dengan peraturan Daerah yang berlaku. Sedangkan Munandar (2000) menyatakan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan Pemerintah yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

D. Kinerja Aparat Pemerintah Daerah

Bernardin dan Russel (dalam Ruky, 2002, h.15) memberikan pengertian kinerja sebagai berikut : *“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during time period”* (Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama kurun waktu). Kemudian pengertian kinerja aparatur menurut Mangkunegara (2000, h.67), yaitu: “Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Pengukuran sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para manajer public dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur financial dan non financial, selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian karena didalam pengukuran kinerja juga ditetapkan reward and punishment system.

kinerja aparat Pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya mempertimbangkan tingkat partisipasi aparat dalam penyusunan anggaran,. Kinerja aparat Pemerintah ditinjau dari seberapa besar keberhasilan aparat Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Penyusunan anggaran ditinjau dari segi seberapa besar ke ikut sertaan pegawai dalam penyumbangan pikirannya untuk penyusunan anggaran. Komitmen organisasi ditinjau dari aspek seberapa

komitmen entitas pemerintahan untuk mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Anggaran berbasis kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai pada pelaksanaan dan efektifitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintahan menyalagunakan kedudukan mereka dan cenderung boros.

Menurut pendekatan anggaran berbasis kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diatasi dan dikendalikan melalui penerapan, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga di tuntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolak ukur sebagai dasar kinerja. Sistem anggaran berbasis kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrument untuk mencapai tujuan dan sasaran program.

Ada beberapa faktor yang diduga menyebabkan kinerja Pemerintah Daerah menjadi rendah diantaranya karena system pengelolaan keuangan Daerah yang masih lemah dimulai dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD, pelaksanaan/penatausahaan APBD, pertanggung jawaban yang berupa pelaporan hasil pelaksanaan APBD dan pengewasan. Dengan adanya keterlambatan dalam pengesahan, menyebabkan banyak program dan kegiatan yang sudah disusun tidak dapat dilaksanakan sehingga menghambat pembangunan daerah tersebut.

Bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut. Kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menungkatkan kemakmuran yang merata.

Menurut Heidjrachman dan Husnan (2002) dalam Sunarcahya (2008), pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. Perbaikan kinerja karyawan
- b. Penyesuaian kompensasi (misalnya membantu pengembalian keputusan dalam menentukan upah, bonus, dan kompensasi lainnya)
- c. Keputusan penempatan
- d. Kebutuhan latihan dan pengembangan (misalnya kinerja yang kurang bias dibenahi dengan cara pelatihan, dari penilaian kinerja dapat ditentukan pelatihan apa sajakah yang sesuai dengan kebutuhan)
- e. Perencanaan dan pengembangan karier.
- f. Penyimpangan proses staffing.
- g. Ketidak akuratan Informasional.
- h. Kesalahan desain pekerjaan (misalnya desai pekerjaan yang salah bias mengakibatkan kinerja rendah, penilaian kinerja bias membantu mendiagnosa apakah ada kesalahan desain kinerja).

- i. Kesempatan kerja yang adil (misalnya penilaian kinerja yang akurat akan menjamin keputusan penempatan internal yang akan diskriminatif).

Lebih lanjut dalam Sunarchaya (2008) menyatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang telah dicapai oleh karyawan didalam realisasikan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Mengukur kinerja aparat Pemerintah Daerah melalui 7 indikator yaitu :

- a. Pencapaian target kinerja kegiatan pada suatu program.
- b. Ketepatan dan kesesuaian hasil.
- c. Tingkat pencapaian program.
- d. Dampak hasil kegiatan terhadap kehidupan masyarakat.
- e. Kesesuaian realisasi anggaran dengan anggaran.
- f. Pencapaian efisiensi operasional.
- g. Perilaku pegawai.

Menurut Kepmendagri No.29 Tahun 2002 pengertian anggaran berbasis kinerja adalah :

- a. Suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya oencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- b. Didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Anggaran dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- c. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektifitas anggaran.

- d. Anggaran kinerja merupakan system yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolak ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran.

E. Indikator pengukuran kerja

Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, 5 komponen yang ada di dalam indikator pengukuran kinerja dalam hal ini kinerja pimpinan dalam pelaksanaan program di SKPD, yaitu:

- a) Masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran.
- b) Keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan/atau nonfisik.
- c) Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
- d) Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
- e) Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses

pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran-ukuran tertentu.

Manfaat pengukuran kinerja :

1. Untuk Mengevaluasi

Yakni untuk mengevaluasi seberapa baik suatu organisasi berkinerja. Proses evaluasi ini terdiri dari dua variabel: data kinerja organisasi dan patokan yang menciptakan suatu kerangka untuk menganalisis data kinerja tersebut.

2. Untuk Mengendalikan

Manajer memiliki kebutuhan untuk memastikan bahwa bawahan mereka telah melakukan pekerjaan mereka secara benar. Organisasi pun menciptakan sistem pengukuran yang menentukan tindakan tertentu apa yang harus dilakukan oleh karyawan. Setelah itu, mereka pun mengevaluasi apakah sang karyawan betul-betul telah melakukan apa yang telah ditugaskan kepada mereka dan membandingkannya dengan standar kinerja.

3. Untuk Menganggarkan

Anggaran adalah perangkat mentah untuk meningkatkan kinerja. Kinerja yang buruk tidak selalu berubah menjadi baik ketika dilakukan pemotongan anggaran sebagai tindakan disipliner. Terkadang penaikan anggaran lah yang menjadi jawaban untuk peningkatan kinerja.

4. Untuk Memotivasi

Para karyawan perlu diberikan target yang signifikan untuk mereka raih dan lalu menggunakan ukuran kinerja -termasuk target antara- untuk memfokuskan energi para karyawan dan memberikan perasaan telah mencapai sesuatu. Target kinerja juga bisa mendorong munculnya kreativitas dalam mengembangkan cara-cara yang lebih baik untuk mencapai suatu tujuan.

5. Untuk Merayakan

Organisasi perlu memperingati prestasi-prestasi yang mereka raih, karena ritual semacam peringatan ini bisa mengikat orang-orang yang ada di dalam tim, memberikan mereka perasaan terikat. Perayaan merupakan aktivitas yang mengeksplisitkan pengakuan atas prestasi dan pencapaian.

6. Untuk Bisa Belajar

Pembelajaran merupakan suatu hal yang dibutuhkan oleh organisasi untuk bisa terus berkembang. Pembelajaran ini bisa didapat dengan mengevaluasi kinerja sendiri, semisal dengan mengidentifikasi apa-apa saja yang berhasil dan yang tidak. Dengan mengevaluasi hal ini, organisasi akan bisa pelajari alasan di balik kinerja baik dan buruk.

7. Untuk Mengembangkan

Organisasi harus belajar tentang apa-apa yang harus dilakukan secara berbeda untuk memperbaiki kinerja. Oleh karenanya organisasi membutuhkan umpan balik untuk menilai kesesuaian rencana dan arahan serta target sehingga bisa didapatkan pengertian mana-mana saja perihal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan.

F. Peneliti Terdahulu

1. Sardjito dan Muthaher (2007)

Sardjito dan Muthaher (2007) meneliti tentang pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah : budaya organisasi dan komitmen organisasi sebagai variable moderating. Data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survey. Pengambilan sample dilakukan dengan metode sensus. Berdasarkan data dikantor Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang, sebanyak 18 kantor dinas dan ada 150 pejabat setingkat Kepala bagian/bidang/subdinas dan Kepala subbagian/subbidang/seksi dari dinas dan kantor pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa ternyata terdapat pengaruh antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial, yang ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,054 dengan signifikan sebesar 0,042 yang lebih kecil dari 0,05. Adanya pengaruh positif antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat Pemerintah Daerah menunjukkan bahwa

semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat Pemerintah Daerah.

2. Septi (2010)

Penelitian Septi (2010) melakukan pengujian partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah dengan motivasi sebagai variabel pemoderasi. Sampel penelitian ini adalah 42 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Padang. Di mana hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan motivasi tidak mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah.

G. Kerangka Pemikiran

Partisipasi dalam penyusunan anggaran diperlukan dengan harapan manajemen lapisan bawah dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tercapainya suatu tujuan, sehingga anggaran tidak hanya dibuat oleh manajemen atas yang mungkin akan sulit diterapkan karena tidak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dengan diikuti sertakannya para pegawai dengan proses penyusunan anggarannya, maka akan mendorong timbulnya semangat yang kuat untuk melaksanakan anggaran yang ditetapkan sehingga kinerja pegawai akan lebih efektif. Selain itu terdapat faktor-faktor lain yang akan dapat mempengaruhi kinerja pegawai.

Gambar

Kerangka Pemikiran



H. Hipotesis

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu “Di duga bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Aparat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur”.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu Timur

Kabupaten Luwu Timur paling timur di Provinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara yang terbentang dari Kecamatan Bauru di sebelah barat hingga Kecamatan Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutana di sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan berdiri pada tanggal 3 Mei 2003

Dalam perjalanan panjang pembentukan kabupaten ini, terangkai suka dan duka bagi para penggagas yang akan menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. Semuanya telah menjadi hikmah yang dapat dipetik pelajaran dan manfaat tak ternilai guna kepentingan membangun daerah ini di masa depan.

Secara kronologis, sekilas perjalanan panjang itu, dapat dilukiskan sebagai berikut:

1. Kisaran Tahun 1959

Pada Bulan Januari Tahun 1959, situasi ketentraman dan keamanan pada hampir seluruh kawasan ini, sangat mencekam dan memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak yang membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota Malili. Peristiwa ini secara langsung melahirkan semangat heroisme yang membara, khususnya di kalangan para pemuda pada waktu itu.

2. Kisaran tahun 1963

Harapan kembali berkembang, ketika dikeluarkan Resolusi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD –GR) Daerah tingkat II Luwu di Palopo, Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tanggal 2 Mei 1963, yang menyetujui Ex Onder Afdeling Malili menjadi Kabupaten.

Kemudian, sebagai perkembangannya, dikeluarkanlah Resolusi Nomor 9/Res/DPRD-GR/1963 yang memutuskan untuk meninjau kembali Resolusi Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 tersebut, sehingga terdapat konsiderans yang berbunyi sebagai berikut: “.....mendesak Pemerintah Pusat RI Cq. Departemen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah agar membagi Dati II Luwu menjadi 4 Dati II yang baru terdiri dari Dati II Palopo, Dati II Tanah Manai, Dati II Masamba dan Dati II Malili”.

3. Kisaran Tahun 1966

Berdasarkan laporan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada sidang seksi Pemerintahan V tanggal 2 Mei 1966, dihasilkan kesimpulan sepakat untuk menyetujui tuntutan masyarakat Ex Kewedanaan Malili menjadi Daerah Tingkat II dengan nama Kabupaten Malili dengan Ibukota di Malili. *dilanjutkan pada Paripurna VI DPRD Propinsi Sul-Sel tanggal 9 Mei 1966 disetujui Ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten.*

Lahirnya keputusan tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran kalangan mahasiswa yang berasal dari wilayah Eks Kewedanaan Malili, dimana secara bersama-sama kalangan muda tersebut dengan penuh semangat mendesak DPRD

Propinsi Sulawesi Selatan untuk merekomendasikan pembentukan Kabupaten di Wilayah Eks Kewedanaan Malili.

Keputusan itu disikapi oleh kalangan mahasiswa dengan semangat heroik dengan melakukan long-march dari Makassar menuju ke wilayah Eks Kewedanaan Malili guna mensosialisaikan Keputusan DPRD Propinsi Sulawesi Selatan. Tidak sedikit rintangan yang dihadapi mereka, baik karena minimnya fasilitas maupun tantangan kurangnya jaminan keamanan pada masa itu. Hal tersebut, tidak sedikitpun melemahkan semangat para Mahasiswa untuk mengunjungi wilayah Eks Kewedanaan Malili, mulai dari Wotu, Mangkutana, Malili, Tabarano dan Timampu serta kembali ke Makassar.

Beberapa bulan kemudian dilakukan pertemuan antara perwakilan penuntut dan penggagas Kabupaten yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga Eks Kewedanaan Malili (IKMAL) dengan Gubernur Sulawesi Selatan, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1966, Gubernur Sul-Sel pada waktu itu Achmad Lamo menyatakan: *“Sebenarnya Malili menjadi Kabupaten tinggal menunggu waktu saja”*.

Pada tanggal 8 Oktober 1966 Panitia Persiapan Pembentukan Daerah Tingkat II Malili dan Masamba menghadap Sekjen Depdagri pada waktu itu (Soemarman, SH). Pada pertemuan itu, Sekjen berjanji akan mengirimkan Tim ke Daerah yang bersangkutan.

4. Kisaran Tahun 1999

Seiring dengan bergulirnya era reformasi yang telah memberikan ruang kebebasan lebih luas terhadap `wacana pemekaran Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan sebagai momentum yang kuat dalam melanjutkan perjuangan aspirasi Masyarakat Ex Kewedanaan Malili untuk membentuk sebuah Kabupaten.

Pada awal tahun 1999, saat pemekaran Kabupaten Luwu sedang dalam proses, timbul kembali aspirasi masyarakat yang kuat menginginkan dan mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk merealisasikan pembentukan suatu Kabupaten pada wilayah Eks Kewedanaan Malili sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi-Selatan.

Menindaklanjuti aspirasi pemekaran Kabupaten Luwu yang beragam, maka DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan DPRD Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan pada pasal 2 sebagai berikut: mengusulkan Kepada Pemerintah Pusat untuk selain menyetujui Pemekaran Daerah TK. II Luwu menjadi 2 (Dua) kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara, agar melanjutkan Pemekaran Kabupaten Daerah Tingkat II dengan menjadikan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Masamba dan bekas Kewedanaan (Onder Afdeling) Malili masing-masing menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II serta peningkatan Kota Administratif Palopo menjadi Kota Madya Daerah TK. II.

Meskipun aspirasi dan tuntutan masyarakat Luwu Timur untuk membentuk Kabupaten Luwu Timur yang otonom sesuai dengan hak historis dan

kecukupan potensi yang dimiliki belum terealisasi, namun tidak mengurangi semangat dan tekad masyarakat Luwu Timur untuk berjuang mewujudkan cita-cita tersebut.

Hal ini dibuktikan dengan digelarnya Pertemuan Akbar masyarakat Ex Kewedanaan Malili pada tanggal 18 Maret 2000 di Gedung pertemuan Masyarakat Malili yang menghasilkan rekomendasi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten Ex Kewedanaan Malili yang hasilnya telah diusulkan melalui surat Nomor 005/PP-Alu/2000 tanggal 20 April 2000 Tentang Usul Pemekaran Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Ketua DPRD Kabupaten Luwu Utara.

Dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat Luwu Timur maka lahir keputusan DPRD Luwu Utara mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pansus dan SK Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2 (dua) wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara.

Hal ini, kemudian direspon oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan DPRD Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap Pembentukan ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu Timur, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat tertanggal 04 April 2002, Nomor 100/134/Bina PB.Bang Wil .

5. Kisaran Tahun 2002 – 2003

Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan usul pemekaran Luwu Utara. Gubernur Sulawesi Selatan menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten Luwu Timur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002.

Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Visi dan Misi Kabupaten Luwu Timur

Rumusan Visi Luwu Timur Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh, Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal), Menjaga aktivitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan. **“Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

“Maju” mengandung makna bahwa Kabupaten Luwu Timur harus mampu berkembang sejajar dengan kabupaten lain di Provinsi Sulawesi

Selatan. Aspek kemajuan yang hendak dicapai sejajar dengan daerah lain adalah kesejahteraan masyarakat secara umum. Sebagai daerah hasil pemekaran, visi “maju” sejajar dengan daerah lain ini tidak hanya merupakan gambaran tentang keadaan yang hendak dicapai, tetapi sekaligus merupakan landasan spirit bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama. Diyakini bahwa posisi geografis yang cukup strategis, dukungan sumberdaya alam, tingkat aksesibilitas yang cukup baik, dan akar budaya yang kuat, memungkinkan Kabupaten Luwu Timur untuk mampu memosisikan dirisebagai Kabupaten yang Maju di Sulawesi Selatan.Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur.

Misi adalah upaya umum untuk mewujudkan visi. Secara lebih operasional, misi adalah upaya umum dalam mencapai perwujudan pokok-pokok visi. Misi dirumuskan dengan menganalisis keterkaitan antara pokok-pokok visi yang hendak diwujudkan dengan permasalahan pokok dan isu strategis daerah secara jangka panjang. Dengan demikian, setiap rumusan misi memiliki keterkaitan yang jelas dengan pokok visi yang akan diwujudkan. Adapun rumusan misi dan penjelasan misi RPJPD Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- (2) Menjaga ketenteraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal).

(3)Menjaga aktivitas pembangunan agar berlangsung secara berkelanjutan.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan pembagian fungsi dalam suatu organisasi. Pembagian tersebut akan memisahkan secara formal masing-masing komponen yang ada sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta menunjukkan hubungan komponen yang satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan pemerintah yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik, diharapkan suatu sistem kerja dapat berjalan dengan lancar sehingga memberikan stabilitas dan kontinuitas yang baik pula yang memungkinkan organisasi tersebut tetap berlangsung walaupun anggotanya silih berganti.

Kantor Dinas mempunyai banyak tugas melakukan kegiatan pemerintah di Daerah serta memantau tugas-tugas karyawan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan direksi. Kantor wilayah dipimpin oleh seorang pimpinan wilayah utama yang diangkat dan bertanggung jawab kepada direksi melalui direktur utama. Dalam pelaksanaan fungsi sehari-hari pimpinan wilayah dibantu oleh :

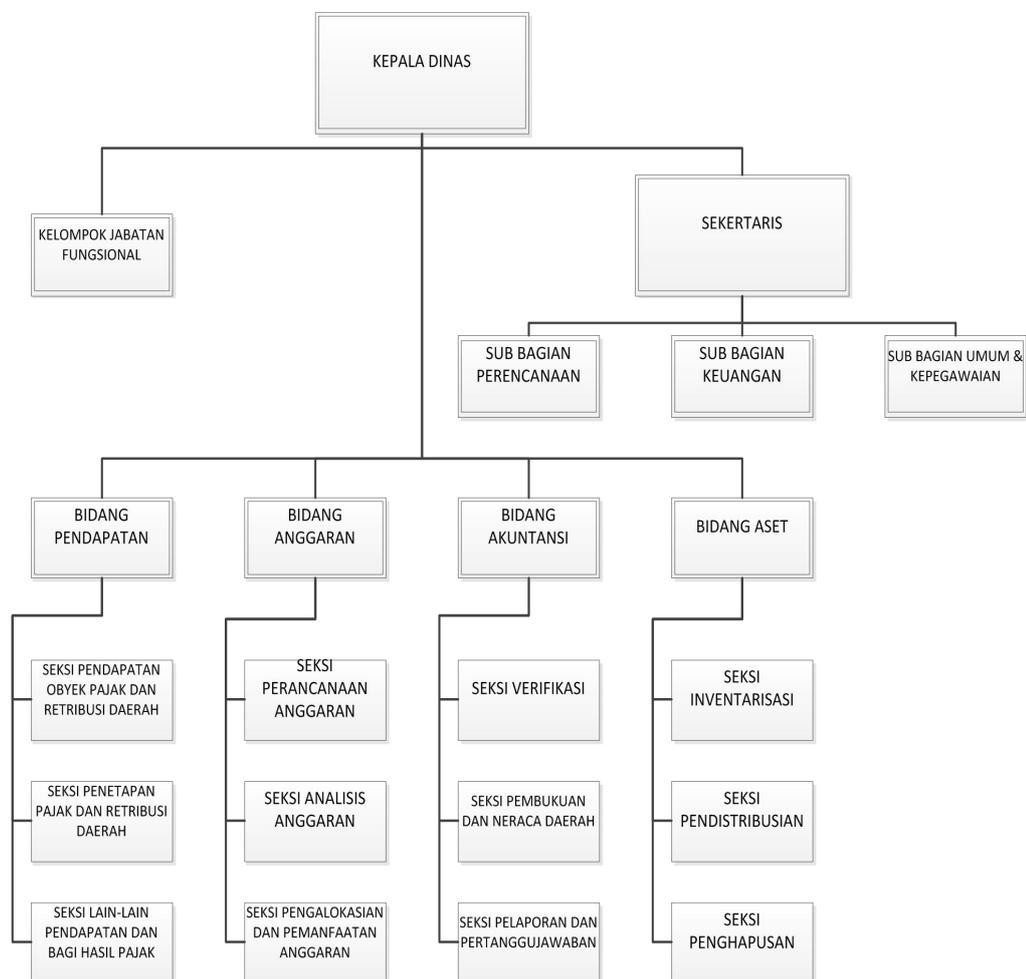
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
- c. Sub Bagian Perencanaan
- d. Sub Bagian Keuangan
- e. Sub Bagian umum & Kepegawaian
- f. Bidang Pendapatan

g. Bidang Anggaran

h. Bidang Akuntansi

i. Bidang Aset

Berikut adalah struktur organisasi dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur :



Pengertian :

A. Kepala Dinas

Unsur pelaksana pemerintah daerah. Daerah dapat berarti Provinsi, Kabupaten, atau Kota. Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

B. Sekertaris Daerah

(disingkat *setda*) adalah unsur pembantu pimpinan pemerintah daerah, yang dipimpin oleh sekretaris daerah (disingkat *sekda*). Sekretaris daerah bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sekretaris Daerah diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan. Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina PNS di daerahnya. Sekretaris Daerah dapat disebut jabatan paling puncak dalam pola karier PNS di Daerah.

C. Sub bagian Perencanaan

Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan BKD.

D. Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas pokok melaksanakan melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan di bidang pengelolaan administrasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan BKD.

E. Sub Bagian Umum & Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kegiatan, pengkoordinasian, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengelolaan administrasi umum, urusan kerumah tanggaan, perlengkapan/perbekalan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian BKD.

F. Bidang Pendapatan

Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Pendapatan Daerah di jabarkan dalam Perda No 8 Tahun 2011 adalah membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Fungsinya :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan layanan umum di bidang pendapatan daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah
4. Pengelolaan kesekretariatan Dinas dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

G. Bidang Anggaran

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan teknis operasional penyusunan dan pengendalian anggaran dan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Bidang Anggaran terdiri dari :

1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan penyusunan anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pengendalian anggaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

H. Bidang Akuntansi

Bidang ini berhubungan dengan audit secara bebas terhadap laporan yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan. Akuntansi pemeriksaan merupakan kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan atau akuntansi umum. Bidang Akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah.

I. Bidang Aset

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah. Bidang Aset Daerah terdiri dari :

1. Sub Bidang Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan pengujian dan analisis kebutuhan dalam rangka pengadaan barang/aset yang akan menjadi milik daerah.
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi pencatatan, inventarisasi dan pengelolaan barang/aset milik daerah.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Responden

Pada penelitian ini yaitu seluruh karyawan Dinas Pendapatan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, dimana pada masing-masing bidang Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah disebar kuesioner sebanyak 70.

Dari kuesioner yang dibagikan, ada 20 yang menolak mengisi kuesioner penelitian ini. Jumlah kuesioner yang disebar pada penelitian ini sebanyak 70 kuesioner yang dibagikan pada seluruh bidang dalam Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah. Hingga batas akhir pengumpulan data, kuesioner yang kembali sebanyak 50 kuesioner dan semuanya mengisi dengan lengkap. Dengan demikian kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 50 kuesioner. Gambaran penyebaran dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2

Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Kuesioner	Respon Rate
Jumlah kuesioner yang disebar	70	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	50	71%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	20	29%

Jumlah kuesioner yang dapat diolah	50	71%
------------------------------------	----	-----

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa dari semua kuisisioner yang disebar pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah di pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, sebanyak 71% diantaranya mengembalikan dan mengisi kuesioner dengan lengkap. Kuesioner diantarkan langsung kepada masing-masing responden dan dijemput kembali dalam rentang waktu 17 Mei sampai 4 Juni 2016.

1. Demografi Responden

Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik responden pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dijadikan sampel pada penelitian ini. Berdasarkan data yang diisi oleh responden pada kuesioner penelitian, diketahui karakteristik responden disajikan secara umum menurut jenis kelamin, jabatan, latar belakang pendidikan, dan lama bekerja.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur diperoleh data tentang jenis kelamin responden. Data tentang responden berdasarkan jenis kelamin ini tersusun dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Perempuan	15	30%
2	Laki-Laki	35	70%
	Jumlah	50	100%

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Proporsi pengelompokkan responden berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 3 di atas ternyata didominasi oleh perempuan dilihat dari kuesioner yang diisi oleh 15 orang atau 30% dan selebihnya diisi laki-laki.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan kuesioner Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah data tentang latar belakang pendidikan responden. Adapun secara lengkap data tentang responden berdasarkan tingkat pendidikan ini disusun dalam Tabel 4 sebagai berikut:

Tabel 4

Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	SLTA	3	6%
2	Diploma 3 (D3)	4	8%

3	Strata 1 (S1)	19	38%
4	Strata 2 (S2)	22	44%
5	Strata 3 (S3)	2	4%
Jumlah		50	100%

Sumber: Data primer diolah 2016

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan responden yang terbanyak adalah pada tingkat Strata 2 (S2) dengan persentase sebesar 44% atau sebanyak 22 orang. Selanjutnya pada tingkat Strata 3 (S3) sebanyak 2 orang atau sebesar 4 %. Sehingga dapat disimpulkan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi responden berpendidikan paling banyak pada Strata 2 (S2).

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah diperoleh data tentang lama bekerja. Adapun secara lengkap data tentang responden berdasarkan lama bekerja ini tersusun dalam Tabel 5 sebesar berikut:

Tabel 5

Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

No	Lama Bekerja	Jumlah	Persentase
1	< 5 tahun	10	20 %
2	5-10tahun	11	22 %
3	> 10tahun	29	58 %

Jumlah	50	100%
---------------	-----------	-------------

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Dari Tabel 5 di atas, terlihat bahwa pada umumnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki masa kerja lebih dari 10 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 58% dan untuk masa kerja dari 5 sampai 10 tahun adalah sebanyak 11 orang atau 22%. Sementara itu terdapat 10 orang atau sebesar 20 % yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun.

B. Analisis Regresi Hasil Penelitian

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik Multikolinieritas ini digunakan untuk mengukur tingkat asosiasi (*keeratan*) hubungan/pengaruh antar variabel bebas tersebut melalui besaran koefisien korelasi (r). Multikolinieritas terjadi jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60 (pendapat lain: 0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ($r < 0,60$). Dengan cara lain untuk menentukan multikolinieritas

a. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat (*independent*) dan variabel bebas (*dependent*) atau keduanya berdistribusikan secara normal atau tidak. Model yang paling baik hendaknya terdistribusi data normal atau mendekati normal. Maka dapat diperoleh hasil dan uji *Kolmogorov Smirnov* sebagai berikut.

Hasil uji normalitas dari variabel penelitian dapat dilihat dalam tampilan berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Persamaan Regresi 1

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	2.72170516
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.187
	Positive	.107
	Negative	-.187
Kolmogorov-Smirnov Z		1.323
Asymp. Sig. (2-tailed)		.060

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data Primer, *diolah*. 2016

Dari hasil pengujian *Kolmogrov-Smirnov* diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,060 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal..

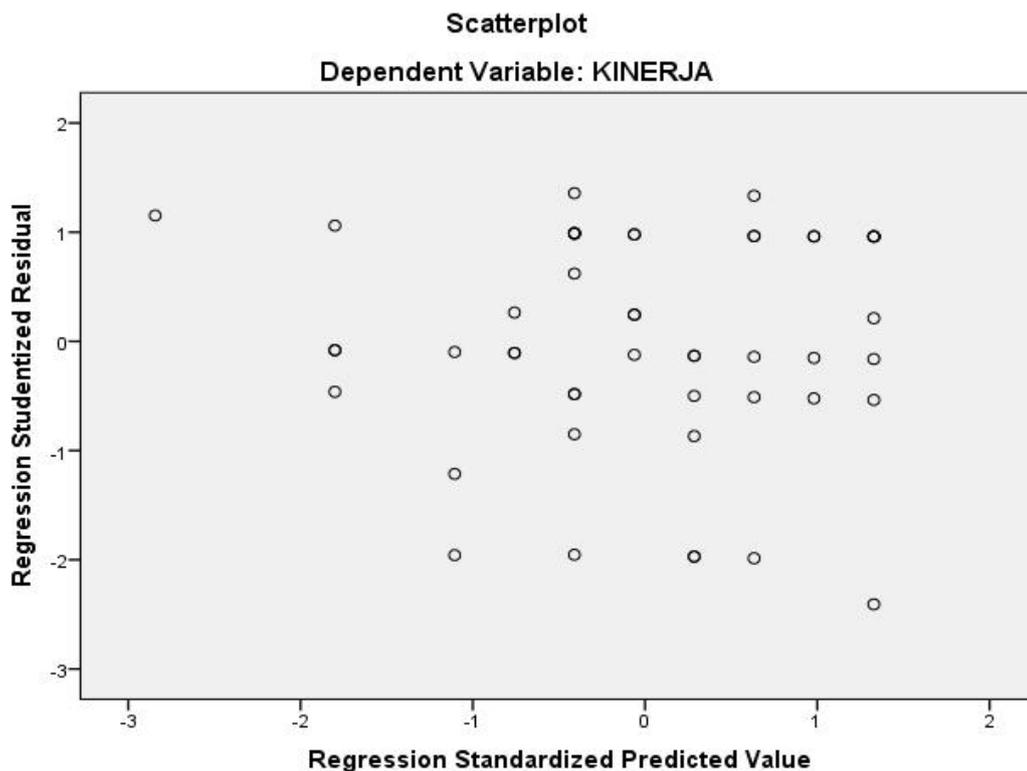
b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi

heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan yaitu dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian heterokedastisitas yaitu metode grafik Scatterplot suatu model regresi dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik pada grafik menyebar.

Berikut ini tampilan output *scatterplot* hasil uji heteroskedastisitas untuk masing-masing persamaan regresi.

Gambar 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi



Sumber: Data Primer, *diolah*. 2016

Gambar grafik *Scatterplot* di atas menunjukkan pengujian heteroskedastisitas memperlihatkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta

tersebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat memberikan kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada persamaan regresi 1 sehingga model regresi layak digunakan melihat pengaruh partisipasi anggaran dengan kinerja aparat.

c. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis diuji dengan statistik regresi linear sederhana. Pengujian dilakukan untuk menjawab hipotesis yaitu melihat pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial.

Hasil pengujian hipotesis 1 tersebut ditampilkan dalam tabel 6 berikut:

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	46.022	3.820		12.049	.000
	PARTISIPASI ANGGARAN	-.025	.137	-.026	-.180	.858

a. Dependent Variable: KINERJA

Berdasarkan tampilan output di atas, persamaan regresi yang dapat disusun adalah sebagai berikut:

$$Y = 46,000 - 0,025X$$

Dari persamaan tersebut diketahui nilai konstanta 46,000 menyatakan bahwa partisipasi anggaran bernilai nol (0) maka nilai kinerja sebesar 46,000. Nilai koefisien - 0,025 yang negative menunjukkan bahwa kinerja belum menunjukkan kinerja yang baik. Nilai koefisien -0,025 juga menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai partisipasi anggaran sebesar 1, maka kinerja akan menurun sebesar -0,025.

Untuk melihat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja digunakan uji-t, yaitu hipotesis dikatakan diterima apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0,180 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1,674.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dikarenakan kinerja aparat belum menunjukkan kinerja yang cukup baik serta ikut dalam proses penyusunan anggaran akan termotivasi untuk mencapai tujuan kinerja aparat. Diikut sertakannya dalam penyusunan anggaran akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena dalam anggaran tersebut terdapat ide atau pemikirannya.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Pada Hasil persamaan regresi 1 digunakan untuk menjawab hipotesis 1, mengenai pengaruh hubungan antara variabel partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat. Hasil persamaan regresi 1 yang menunjukkan t hitung sebesar dalam persamaan tersebut diketahui nilai konstanta 46,000 menyatakan bahwa partisipasi anggaran bernilai nol (0) maka nilai kinerja sebesar 46,000. nilai koefisien -0,025 yang negative menunjukkan bahwa kinerja belum menunjukkan kinerja yang baik. nilai koefisien -0,025 juga menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai partisipasi anggaran sebesar 1, maka kinerja akan menurun sebesar -0,025.

Untuk melihat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja digunakan uji-t, yaitu hipotesis dikatakan diterima apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0,180 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1,674. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variable partisipasi anggaran tidak berpengaruh, karena didalam instansi Dinas Pendapatan Pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur, antara partisipasi dengan kinerja aparat pemerintah tidak ditemukannya perbedaan.

Karena dalam melibatkan para aparat pemerintah dalam proses penyusunan anggaran akan diperoleh informasi yang lebih relevan sehingga anggaran yang disusun akan lebih realistis. Hal ini akan memudahkan pencapaian target anggaran sehingga kinerja yang ditetapkan akan lebih mudah untuk dicapai.

Dalam pencapaian anggaran diperlukan kekompakan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, maka dari itu seluruh aparat pemerintah yang ada di Dinas Pendapatan Pengelolaan pendapatan keuangan dan aset daerah yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Harus ikut serta dalam penyusunan anggaran yang akan diolah sehingga tujuan yang diharapkan tercapai.

Dengan penyusunan anggaran akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang tinggi, karena di dalam instansi pemerintah terdapat informasi yang memadai serta terdapat ide atau pemikiran yang relevan, sehingga memudahkan kinerja yang di tetapkan mengenai dimana dia berkerja.

BAB VI

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada pengujian hasil penelitian menggunakan SPSS menggunakan persamaan regresi linear sederhana, dalam persamaan tersebut diketahui nilai konstanta 46,000 menyatakan bahwa partisipasi anggaran bernilai nol (0) maka nilai kinerja sebesar 46,000. nilai koefisien -0,025 yang negative menunjukkan bahwa kinerja belum menunjukkan kinerja yang baik. nilai koefisien -0,025 juga menunjukkan apabila terjadi peningkatan nilai partisipasi anggaran sebesar 1, maka kinerja akan menurun sebesar -0,025.

Untuk melihat pengaruh antara partisipasi anggaran terhadap kinerja digunakan uji-t, yaitu hipotesis dikatakan diterima apabila nilai t hitung lebih besar dari pada t tabel ($t_{hitung} > t_{tabel}$) dengan nilai signifikansi sebesar 0,05. Dari tabel diatas dapat diketahui nilai t hitung sebesar -0,180 sedangkan nilai t tabel yaitu sebesar 1,674.

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja. Dikarenakan keterlibatan antara para aparat pemerintah dalam proses penyusunan anggaran, tidak ditemukannya perbedaan antara satu dengan yang lain. Dengan penyusunan anggaran akan menimbulkan rasaa tanggung jawab yang tinggi, sehingga memudahkan kinerja yang ditetapkan mengenai dimana dia bekerja.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut: Diharapkan Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur memperhatikan faktor *partisipasi anggaran* dan faktor-faktor lain agar dapat meningkatkan kinerja para Aparat di dalam hubungannya keikutsertaan dalam penyusunan anggaran. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan variabel penelitian, dan menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data yang objektif dan akurat. penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas ruang lingkup penelitian pada tingkat objek penelitian yang lebih kompleks.

Serta Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Luwu Timur lebih relevan sehingga informasi yang diperoleh lebih realistis, hal ini akan memudahkan pencapaian target anggaran sehingga kinerja yang ditetapkan akan lebih mudah dicapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Kamaruddin. 2014. *Akuntansi Manajemen : Dasar-Dasar Konsep Biaya Dan Pengambilan Keputusan*. Edisi Revisi. Jakarta : rajawali pers.
- Bambang Sardjito, dan Osmad Muthaher. 2007. “*Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating*”. Makasar.
- Departemen Dalam Negeri, 2004. *Pemerintah Daerah dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan*.
- Handayani, Chici.2013. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Mardiana, Septi. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Skripsi* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
- Mattola, Ridwan. 2011. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Dengan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin
- Mongeri, Messa. 2007. ”Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating”, (online), (<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/download/67/55>), halaman web, diakses 4 Maret 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Trisnaningsih, Sri. 2003. Pengaruh Komitmen Terhadap Kepuasan Kerja Auditor: Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. *Vo. 6 No. 2 Mei 2003. 199-216*.
- Wibowo. 2013. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wulandari, Nur Endah. 2011.“Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Kepuasan Kerja Dan Komitmen

Organisasi Sebagai Variable Moderating”, (online),
(<https://core.ac.uk/download/files/379/11727022.pdf>), halaman web,
diakses 4 maret 2016.

Wulandari, Nivo. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Skripsi Universitas Negeri Padang

<http://www.BlogtutorialSPSS.blogspot.com>

RIWAYAT HIDUP



ENDANG PERMATA SARI, Lahir di Palopo, 11 Maret 1991, anak ke delapan dari delapan bersaudara dari pasangan Ayahanda (Alm.) Soemani Sanadjaya dan Ibunda Djumiem. Pendidikan yang telah ditempuh yaitu tamat SDN. 186 Kebun Rami Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur tahun 2003, SMPN. 1 Mangkutana Kec. Mangkutana, Kab. Luwu Timur tahun 2006, SMAN. 1 Tomoni Kec. Tomoni, Kab. Luwu Timur tahun 2009. Kemudian pada tahun 2012 terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBIS), Jurusan Akuntansi, Program Studi Strata Satu (S1).

